

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darda Syahrizal. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Fifik Wirayani. 2009. *Reformasi Hak Ulayat*. Malang: Setara Press.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nandang Sudrajat. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Prajudi Admosudirjo. 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta
- R. Abdoel Djamali. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2004. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: R&D. Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017

Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan

Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau

Pejabat Pemerintahan;

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor 02

Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan

Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan

Pemerintahan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

C. Surat Kabar

Agung Hermansyah. 14 Maret 2017. *Mengawasi Pertambangan Di Daerah Di Era UU No. 23/2014*. Dalam Opini Koran Padang Ekspres.

D. Internet

Harian Haluan.Com. “*Di Sumbar, 225 Izin Tambang Bermasalah*”

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/64209/di-sumbar-225-izin-tambang-bermasalah> Diakses tanggal 18 Desember 2018.

Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung. “*Evaluasi Penataan Izin Usaha Pertambangan*”. <http://hmt.mining.itb.ac.id/evaluasi-penataan-izin-usaha-pertambangan/>. Diakses tanggal 29 November 2018.

